



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur



2023

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Kesejahteraan Rakyat ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023. Laporan ini disusun sebagai implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Dengan disusunnya LKjIP Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal Biro Kesejahteraan Rakyat dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat. Semoga laporan kinerja ini dapat menjadi salah satu upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat kedepannya.

Surabaya, 05 Januari 2024

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat



IMAM HIDAYAT, S.Sos. M.M.

Pembina Utama Muda

NIR. 19700805 199703 1 004

LAPORAN KINERJA
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN 2023

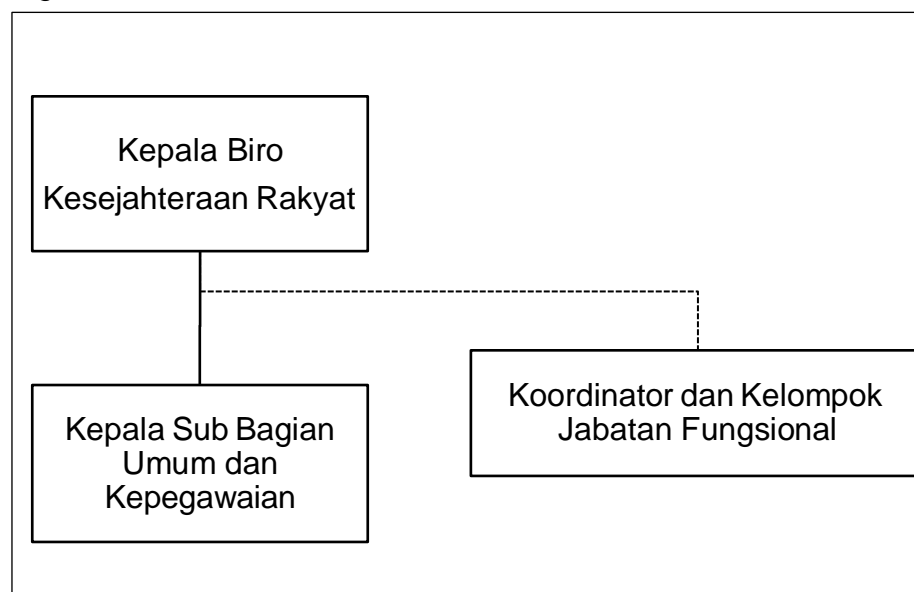
I. PENDAHULUAN

A. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya sehingga menghasilkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk akuntabilitas tersebut, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tahun 2022, Biro Kesejahteraan Rakyat mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:



B. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Sedangkan fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Adapun Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Biro;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- e. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Biro;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategi, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup Biro;
- g. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro;
- h. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan Biro;
- i. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
- j. Melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

C. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat di masa datang. Sesuai dengan RPJMD dan Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2014 – 2019 yang kemudian mengalami peralihan menjadi Rencana Strategis Tahun 2019-2024 , maka isu penting yang menjadi fokus sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut :

1. Dimana kita pahami bersama bahwa agama berperan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hubungan antar manusia, yang dinilai dengan indeks kesalehan sosial. Karena semua agama pasti mengajarkan kebaikan, sikap percaya, toleransi, tolong menolong dan partisipasi dalam aksi bersama yang akan meningkatkan keharmonisan sosial. Hubungan toleransi antar masyarakat Jawa Timur sangat baik selama tahun 2022, dimana tidak terjadi konflik antar umat beragama maupun golongan;
2. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah pondok pesantren yang besar, yaitu tercatat pada tahun 2022 terdapat

- 4.452 lembaga dengan jumlah santri sebanyak 564.299 orang atau setara dengan 2,4% dari jumlah penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) Jawa Timur. Dengan demikian pondok pesantren memberikan warna yang penting dalam perkembangan keagamaan di Jawa Timur, dan sebagaimana kita mengerti bahwa perkembangan agama di Jawa Timur membawa dampak yang besar bagi pembangunan. Namun masih banyak pondok pesantren di Jawa Timur yang belum memberikan bekal yang utuh bagi santrinya. Kurangnya pendidikan formal di pondok pesantren dan pendidikan keterampilan vokasional yang diajarkan di pesantren, menyebabkan tamatan pondok pesantren memiliki ilmu yang terbatas pada ilmu agama saja;
3. Di beberapa Kabupaten di Jawa Timur, masih ada budaya pernikahan dini yang membawa dampak kurang baik bagi kesehatan Ibu muda dan anak, sehingga dapat mempengaruhi nilai AKI, AKB dan balita stunting di Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan belum adanya rumusan kebijakan yang bersifat komprehensif tentang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak yang nantinya akan berdampak kepada ketahanan dan kesehatan keluarga;
 4. Selain itu juga terdapat lembaga pendidikan keagamaan dengan kualitas tenaga pengajar yang masih sangat terbatas, sedangkan lembaga tersebut menjadi satu-satunya lembaga yang memberikan pendidikan kepada anak-anak sekitar tanpa didukung pendidikan formal lainnya. Dengan kualitas pengajar yang terbatas dibidang agama, dapat menyebabkan ilmu keagamaan yang diterima anak-anak menjadi kurang komprehensif dan rentan dengan gangguan dari paham radikalisme. Disinilah arti penting dari program peningkatan kualitas Guru Madin yang dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat melalui Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD), untuk meningkatkan kualitas pengajar lembaga pendidikan keagamaan di Jawa Timur. Sehingga bisa memberikan makna dan nilai Agama Islam sebagai *rahmatan lil alamin* bagi generasi muda Jawa Timur;
 5. Banyaknya huffadz yang dihasilkan oleh Pondok Pesantren di Jawa Timur, tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang

formal yang lebih tinggi, karena faktor ekonomi, perbedaan kurikulum dan kurangnya pengetahuan formal. Sedangkan jika langsung dilepas pada kehidupan bermasyarakat, maka pilihan pekerjaan terbatas untuk menjadi Guru Madrasah atau Guru Ngaji, karena kurangnya modal dan ketrampilan dari santri dan santriwati;

6. Masih banyak Masjid di wilayah Jawa Timur yang belum sejahtera khususnya di wilayah terpencil, daerah miskin, kampung nelayan, daerah rawan aqidah, pegunungan dan kepulauan. Padahal Masjid memiliki potensi besar sebagai lembaga umat dan bertemunya jamaah dari berbagai latar belakang. Saat ini data masjid yang termasuk dalam kriteria tersebut belum ada. Namun dari koordinasi awal dengan Dewan Masjid Indonesia di beberapa Kabupaten di Jawa Timur sebagai sampling diperoleh informasi bahwa masjid yang termasuk kriteria di wilayah terpencil, daerah miskin, kampung nelayan, daerah rawan aqidah, pegunungan dan kepulauan berkisar 1,5% - 2 % dari jumlah masjid yang ada. Oleh karena itu Imam dan Pengurus Masjid di daerah yang sesuai kriteria tersebut perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah sebagai upaya untuk mendukung kehidupan beragama yang lebih baik.

Dengan berbagai permasalahan yang berkembang tersebut, maka strategi yang dilakukan Biro Kesejahteraan Rakyat adalah:

- Meningkatkan keharmonisan sosial masyarakat Jawa Timur;
- Meningkatkan potensi pondok pesantren di Jatim;
- Meningkatkan kualitas tenaga pengajar lembaga pendidikan keagamaan di Jawa Timur;
- Bersinergi dengan Perangkat Daerah Mitra untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan pentingnya membangun ketahanan keluarga;

D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai kegiatan di bidang bina mental spiritual, karena program/ kegiatan ini tidak diampu oleh Perangkat Daerah lain di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu Biro Kesejahteraan Rakyat juga ikut mendukung salah Indikator Keberhasilan Daerah yaitu Indeks Kepedulian Sosial.

Cascading Biro Kesejahteraan Rakyat di tahun 2022 mengalami perubahan, sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis pada Biro Kesejahteraan Rakyat 2019-2024. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat Perkembangan Kebijakan Nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terjadi perubahan nomenklatur, struktur, tugas dan fungsi;
3. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan perubahan tersebut maka cascading Biro Kesejahteraan Rakyat adalah, sebagai berikut :

Visi Gubernur & Wakil Gubernur

Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong

Misi ke-3

Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

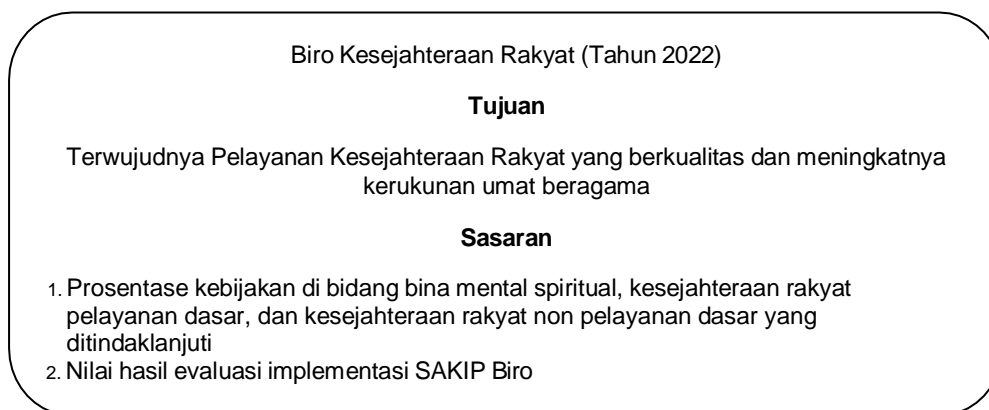
Tujuan

Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar

Sasaran

Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program: Kesejahteraan Rakyat
Indikator: 1. Persentase indikator program yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran 3. Indeks profesionalisme ASN	Indikator: 1. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual 2. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar



Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar 4. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual 5. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar 6. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar
Indikator: 1. Persentase indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat yang tercapai	
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan: Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
Indikator: 1. Persentase realisasi anggaran biro Kesejahteraan Rakyat	Indikator: 1. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual 2. Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kelembagaan bina spiritual
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Indikator: 1. Persentase realisasi anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat	

<p><u>Kegiatan:</u> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p><u>Indikator:</u> 1. Prosentase pegawai yang memenuhi waktu kerja efektif 75.000 menit sesuai tugas pokok dan fungsi</p>	<p>3. Prosentase sarana dan prasarana spiritual yang terkelola di bidang sarana prasarana spiritual</p> <p>4. Prosentase lembaga spiritual yang terfasilitasi dibidang kelembagaan spiritual</p> <p>5. Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual</p> <p>6. Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual</p> <p>7. Jumlah pelaksanaan peringatan Hari Besar Keagamaan di Jawa Timur di bidang Kelembagaan Bina Spiritual</p>
<p><u>Kegiatan:</u> Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p><u>Indikator:</u> 1. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum</p>	<p><u>Kegiatan:</u> Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</p> <p><u>Indikator:</u> 1. Prosentase Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang pendidikan</p>
<p><u>Kegiatan:</u> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p><u>Indikator:</u> 1. Jumlah paket pengadaan aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p>	<p>2. Prosentase Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan</p> <p>3. Prosentase Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja yang menghasilkan kebijakan di bidang Sosial</p> <p>4. Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang Pendidikan</p> <p>5. Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang Kesehatan</p> <p>6. Prosentase realisasi permohonan bantuan hibah yang ditindaklanjuti di bidang Pendidikan</p>

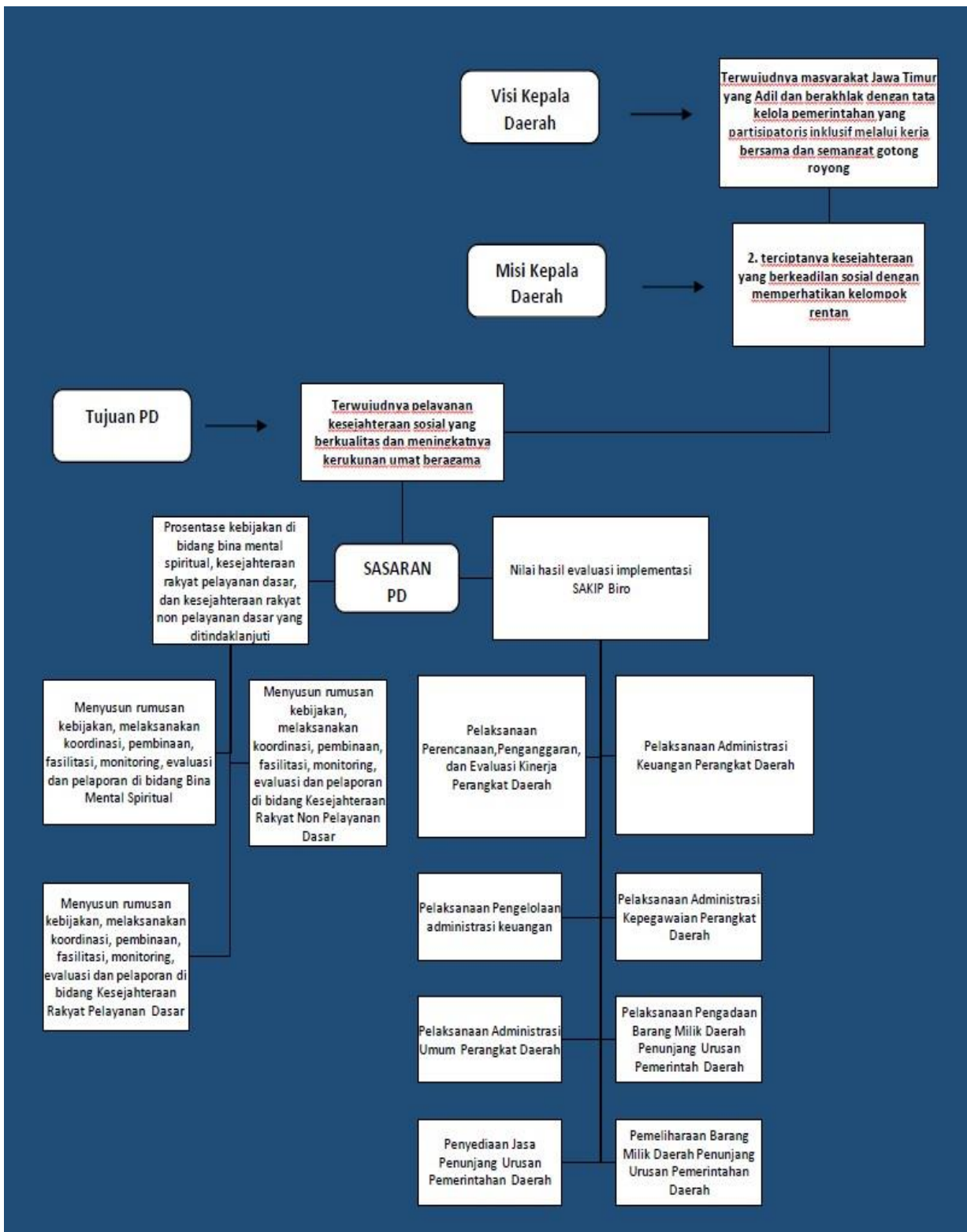
	<p>Tenaga Kerja</p> <p>6. Jumlah pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional di Jawa Timur di di bidang Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</p>
--	--

Pada tahun 2022 terdapat perkembangan kebijakan nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020. Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu juga adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terjadi perubahan nomenklatur, struktur, tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah. Permendagri ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur 188/48/KPTS/013/2022 yang mengubah nomenklatur, struktur dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat di tahun 2021.

Cascading kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat dapat tergambar sebagai berikut :



Tabel Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator

Biro Kesejahteraan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	Tujuan : Indeks Kepedulian Sosial Sasaran : 1 Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti 2 Nilai hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Biro	<u>Program</u> : Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual • Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar • Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar • Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual • Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar • Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar
			<u>Kegiatan</u> : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan dibidang kelembagaan bina spiritual • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan dibidang bina kehidupan spiritual

				<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual
				<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kelembagaan bina spiritual Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang bina kehidupan spiritual
			<p><u>Sub Kegiatan :</u></p> <p>Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual</p>	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase data diolah di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Prosentase kebijakan yang dianalisa di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Prosentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang sarana prasarana spiritual yang ditindaklanjuti
			<p>Fasilitasi Kelmbagaan Bina Spiriuial</p>	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase data yang diolah dibidang kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang kegiatan keagamaan dan pembinaan kehidupan beragama Prosentase kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan di Jawa Timur yang terlaksana Prosentase data yang diolah dibidang lembaga bina spiritual Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang lembaga bina spiritual Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah dibidang Kelembagaan bina spiritual yang ditindaklanjuti

			<p><u>Kegiatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pendidikan • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang social • Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendidikan • Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kesehatan • Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang social
			<p><u>Sub Kegiatan :</u></p> <p>-Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase data yang diolah dibidang pendidikan • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang pendidikan • Prosentase kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional di bidang pendidikan yang terlaksana
			<p>- <u>Sub Kegiatan :</u></p> <p>Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang pendidikan yang ditindaklanjuti • Prosentase data yang diolah dibidang kesehatan • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang kesehatan
			<p>- <u>Sub Kegiatan:</u></p> <p>Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase data yang diolah dibidang sosial • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang sosial • Prosentase kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional di bidang sosial yang terlaksana • Prosentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang sosial yang ditindaklanjuti

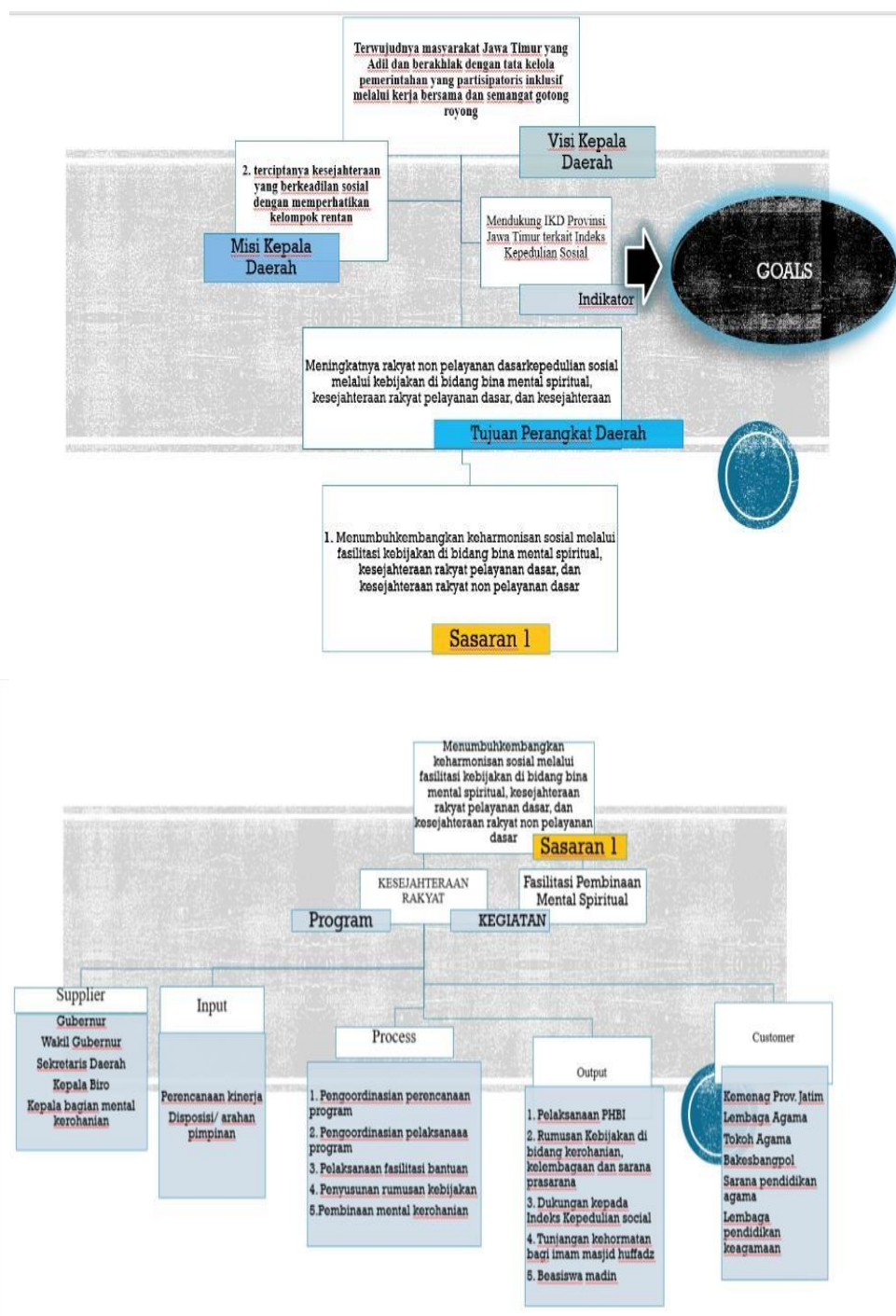
		<p>Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata • Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja • Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata • Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja • Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata • Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja • Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata • Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja • Prosentase data yang diolah di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata • Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata • Prosentase kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang terlaksana
--	--	--	---

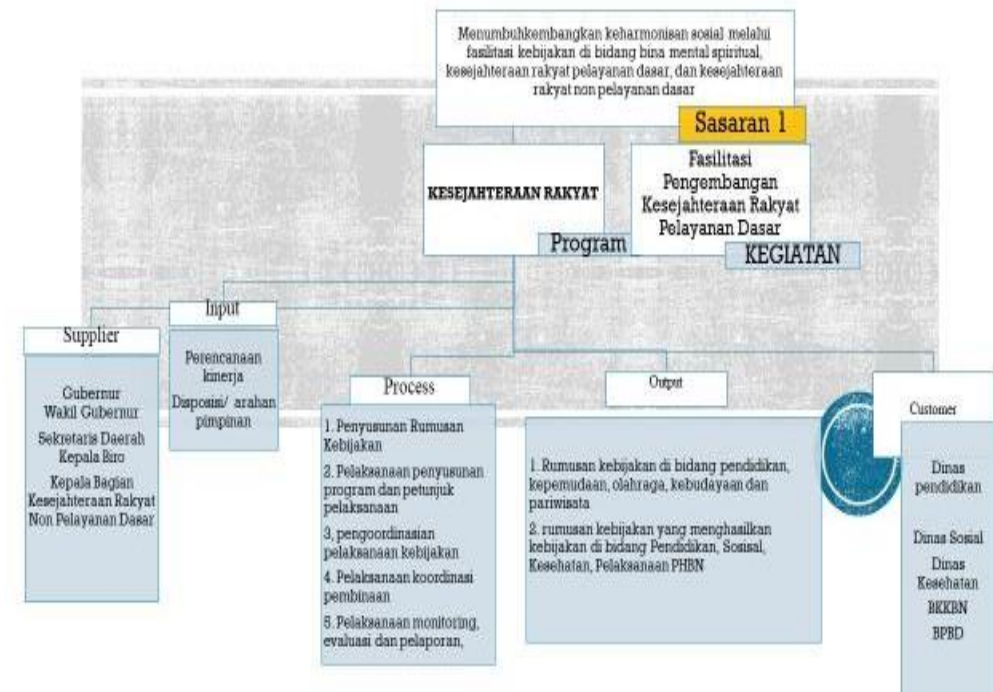
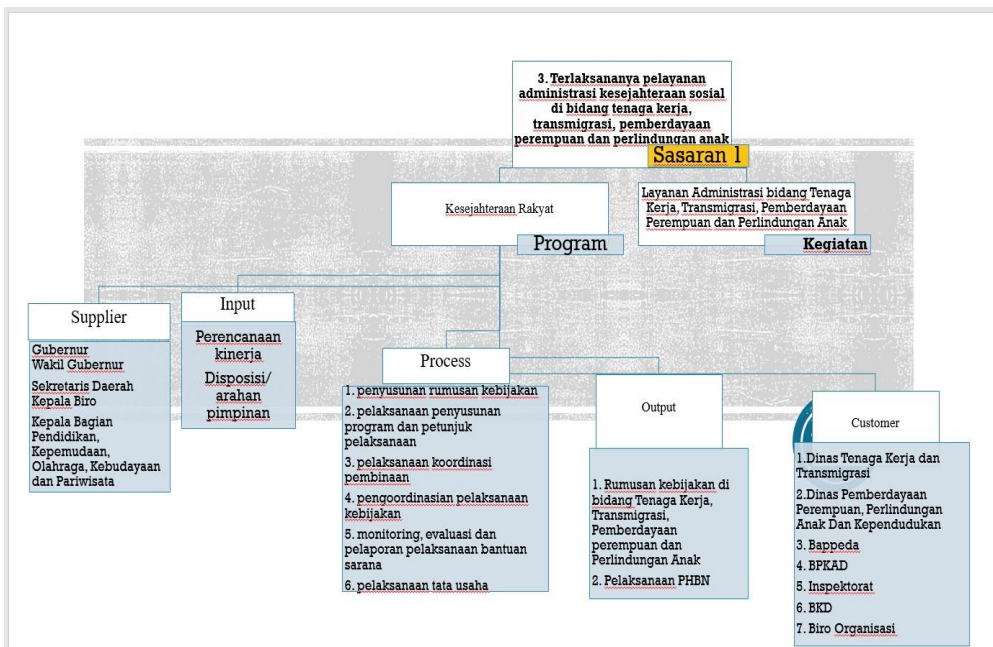
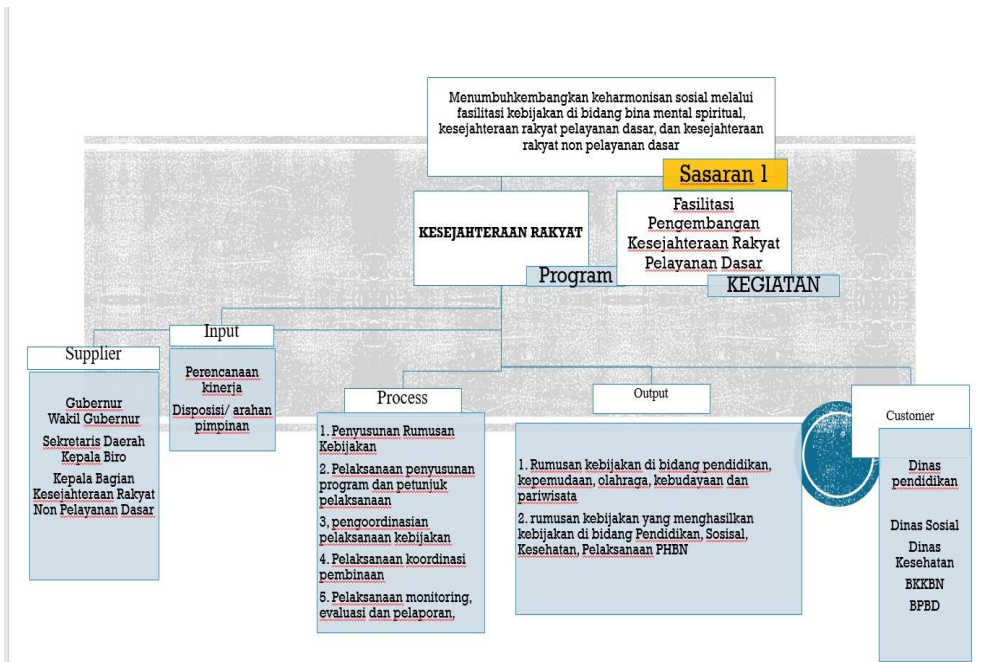
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang ditindaklanjuti
		<p><u>Sub Kegiatan :</u> Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja Prosentase data yang diolah di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
		<p><u>Sub Kegiatan :</u> Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</p>	
		<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase data yang diolah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga kerja Prosentase kebijakan yang dianalisa dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Prosentase kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan
		<p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI <p>Kegiatan :</p>	<ul style="list-style-type: none"> Persentase indikator program yang tercapai Persentase realisasi anggaran Indeks profesionalis me ASN

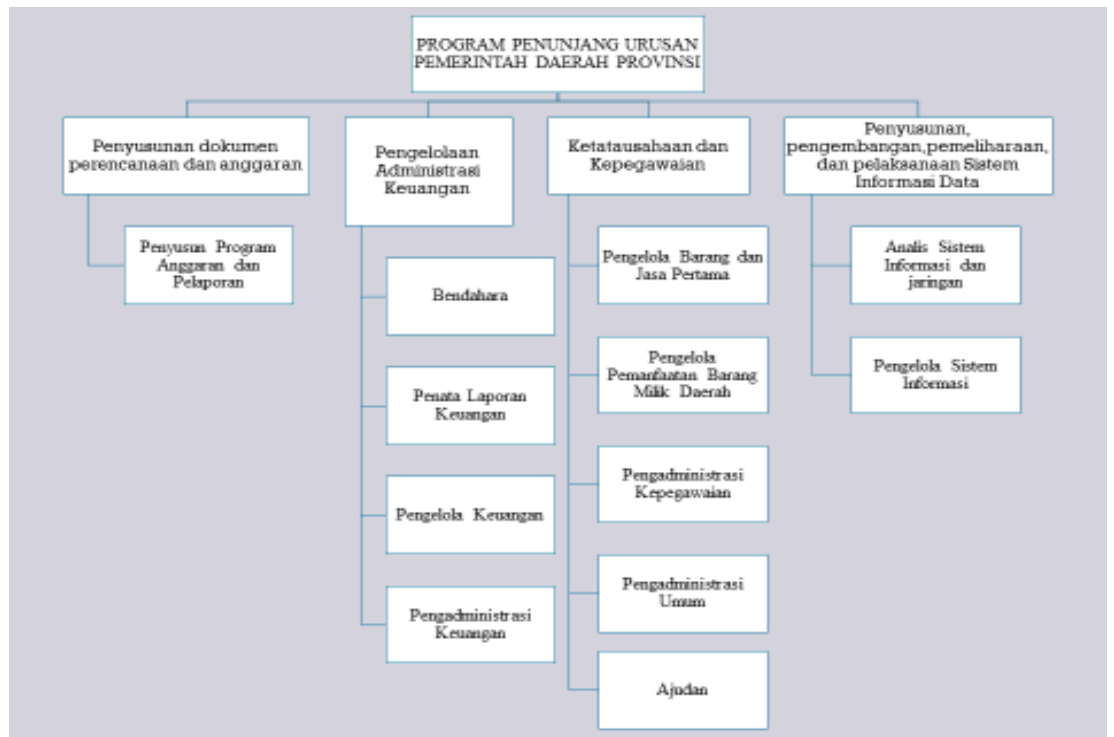
		<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat yang tercapai
		<ul style="list-style-type: none"> <u>Sub kegiatan:</u> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja
		<u>Kegiatan:</u> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran biro Kesejahteraan Rakyat
		<u>Sub Kegiatan :</u> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi Biro

E. Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis yang mendasari kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2021 berdasar pada peta proses bisnis baru, dengan nomenklatur berdasar pada Kepgub Nomor 188/48/KPTS/013/2022 dan hanya menitikberatkan pada strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Namun demikian peta proses bisnis ini masih memiliki banyak kekurangan, karena secara eksternal belum berdasarkan pada Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang seharusnya bisa menggambarkan dengan jelas posisi Biro dalam strategi pencapaian Sekretariat Daerah untuk menunjang visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur.







F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Dari hasil Evaluasi Kinerja tahun 2023, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan antara lain :

1. Biro Kesejahteraan Rakyat telah menerapkan Evaluasi Kinerja sebagai tahap pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Biro Kesejahteraan Rakyat menyusun dokumen perencanaan dan telah menjabarkan ke berbagai sasaran dan indikator kinerja disemua level. Hal yang perlu diperhatikan adalah kecukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran strategis dan hasil program;
3. Mekanisme cascade kinerja sebaiknya berpedoman pada proses bisnis organisasi;
4. Pelaksanaan reviu kinerja internal secara berkala belum optimal untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja.

II. PERENCANAAN KINERJA

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Meskipun Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur belum memiliki Rencana Strategis yang seharusnya menjadi dasar bagi setiap Biro untuk menyusun Renstra masing-masing, sehingga Rencana Strategis yang dibuat oleh masing-masing Biro dalam Sekretariat Daerah

bisa selaras dalam menunjang Visi dan Misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Dengan kondisi yang demikian terbatas, serta berdasar pada Reviu RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, Biro Kesejahteraan Rakyat menyusun Rencana Strategis Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial tahun 2019-2024 yang memuat tujuan organisasi yang ingin dicapai. Tujuan ini menjadi target yang ingin dicapai pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 terdapat perubahan nomenklatur, struktur dan fungsi yang tentu juga merubah tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikatornya. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan

Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

2. Sasaran

Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

3. Tujuan

Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

4. Sasaran

Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat pada dokumen Renstra 2019 - 2024 bisa ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya kepedulian sosial melalui kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan	Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat	Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar

rakyat non pelayanan dasar	non pelayanan dasar	yang ditindaklanjuti
		Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Biro

Biro Kesejahteraan Rakyat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2022 menyesuaikan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2024. IKU ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Adapun indikator utama Biro Kesejahteraan Rakyat yang menjadi acuan, ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Biro Kesejahteraan Rakyat

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Biro 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan dan ditindaklanjuti di Bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Biro

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan, Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan kinerja tertentu berdasarkan Sumber Daya Organisasi yang dimiliki.

Sebagaimana perubahan Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat yang tertera pada Keputusan Gubernur 188/48/KPTS/013/2022, Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 sebagai Perangkat Daerah diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro

Kesejahteraan Rakyat dengan Gubernur Jawa Timur, dilanjutkan dengan Perjanjian kinerja antara Pejabat Fungsional Ahli Madya (Koordinator) dengan Kepala Biro serta antara Pejabat Fungsional Ahli Muda (Sub Koordinator) Pejabat Fungsional Ahli Madya dan seluruh Staf dengan Pejabat Fungsional Ahli Muda di masing-masing Fungsi.

Berikut diuraikan perjanjian kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 dalam rangka mencapai tujuan :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	1. Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	87
		2. Nilai hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Biro	82

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2023, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Biro. Indikator yang digunakan merujuk pada tujuan Biro yang ingin dicapai melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Gubernur 188/48/KPTS/013/2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**
 Pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian kinerja di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan tujuan dan mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pengukuran Kinerja yang ditetapkan atas dasar sasaran, indikator kinerja, target, realisasi dan prosentase pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN %
1.	Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	1. Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	82	89,16	108,73
		2. Nilai hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Biro	82	82	100,00

- b. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**
Dikarenakan terdapat peralihan perubahan program, kegiatan, sub kegiatan, tujuan, sasaran dan indikator capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka perbandingan capaian kinerja akan digambarkan melalui tabel 3.2 berikut

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2022		2023	
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Kesejahteraan Rakyat	1. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual	98,80	113,56	89,00	100,00
		2. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	99,12	113,93	89,00	100,00
		3. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	98,48	113,19	89,00	100,00
		4. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual	98,8	123,5	82,45	98,80
		5. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	99,12	123,9	81,50	97,59
		6. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	98,48	123,1	82,45	98,80
2	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Persentase indikator program yang tercapai	91,84	112	89,16	108,73
		2. Persentase realisasi anggaran	98,51	103,69	94,68	99,66
		3. Indeks profesionalisme ASN	85	106,25	82	100

Apabila dilihat capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja dan anggaran ada sedikit pembaharuan terkait pelayanan administrasi bantuan hibah dilakukan perbaikan tata kelola dan alur pelayanan

administrasi bantuan hibah yang membutuhkan waktu untuk menemukan formulasi yang tepat. pada tahun 2021 hal tersebut didukung oleh inovasi site baru “Desa Basra” yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat sepanjang Tahun 2023.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dengan adanya refocusing anggaran pada tahun 2021 untuk penanganan pandemi covid-19, maka Biro Kesejahteraan Rakyat menurunkan target capaian kinerja dari yang sebelumnya terdapat pada dokumen perencanaan strategis. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan fasilitasi sehingga berpengaruh pada outcome yang dihasilkan Biro. Meskipun sebagian besar kegiatan dapat terselenggara secara daring, namun dengan keterbatasan sarana, kualitas dan kapasitas SDM, maka dilakukan juga rasionalisasi target kinerja. Kemudian dengan adanya kebijakan nasional untuk perubahan nomenklatur dan struktur organisasi menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat di tahun 2021, maka disusunlah Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 yang memuat berbagai perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan masing-masing indikatornya. Dengan demikian target kinerja tahun 2021 hingga 2024 menyesuaikan dengan dokumen perubahan Renstra dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menyebabkan Realisasi di tahun 2022 tidak dapat disandingkan dengan realisasi 2023 dikarenakan perbedaan target kinerja dan perubahan struktur. Target Renstra dan realisasi 2023 dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja pada tahun 2023 sampai 2024

No	Program	Indikator	Realisasi	Target Renstra			
			2023	2021	2022	2023	2024
1.	Program Kesejahteraan Rakyat	1. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual	89	87	88	89	89
		2. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang	89	87	88	89	89

		Kesejahteraan Rakyat Pelayan Dasar					
		3. Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	89	87	88	89	89
		4. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual	83,50	-	-	-	-
		5. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	81,52	-	-	-	-
		6. Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	82,48	-	-	-	-
2.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Persentase indikator program yang tercapai	89,16	80	82	85	87
		2. Persentase realisasi anggaran	94,68	95	95	97	97
		3. Indeks profesionalisme ASN	82	80	80	82	82

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Kenaikan capaian kinerja di tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa dianalisa sebagai berikut :Strenght	Weakness	Opportunities	Threat
a. Jumlah SDM yang cukup banyak b. Peran biro yang strategis sebagai fasilitator dan koordinator Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan terkait c. Adanya kesempatan untuk merasionalkan	a. Jadwal survei lembaga calon penerima bantuan hibah yang diundur karena pandemi membuat kegiatan menumpuk diakhir tahun	a. Banyaknya Perangkat daerah yang menjadi mitra bisa memberikan masukan data dan bekerjasama dalam perumusan kebijakan	a. Belum adanya dokumen perencanaan di Sekretariat Daerah yang seharusnya menjadi dasar bagi masing-masing Biro untuk menyusun dokumen perencanaan

target setelah refocusing anggaran d. Inovasi perubahan sistem dalam upaya percepatan realisasi bantuan hibah			
--	--	--	--

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dengan memasang faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

a. Strength – Opportunity

Fokus pada kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.

- 1) Bekerjasama dengan Perangkat Daerah mitra dengan mengoptimalkan jumlah SDM yang banyak secara bergantian. Meskipun dilakukan secara daring, namun masing-masing staf memiliki pengalaman untuk berkoordinasi dan “sharing knowledge” dengan PD mitra.
- 2) Setiap staf terlibat aktif dalam rapat koordinasi perumusan kebijakan dengan fokus pada tugasnya pada jabatan fungsional, pengolah data, atau analis.
- 3) Berkoordinasi dengan Bappeda terkait rasionalisasi target capaian kinerja serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Mitra untuk mempertimbangkan sub kegiatan yang masih dapat terlaksana dengan adanya pandemi dan refocusing anggaran, serta berdasar pada arahan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- 4) Melakukan evaluasi pemberian bantuan hibah melalui Desa Basra. Inovasi ini merupakan bentuk pembaharuan dalam pemberian dukungan layanan administrasi bantuan hibah agar lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan Aplikasi Abah Kesra (Aplikasi Bantuan Hibah Biro Kesra) dan platform digital pendukung lainnya. Pada tahun 2023 Biro Kesejahteraan Rakyat memberikan dukungan layanan administrasi bantuan hibah kepada kurang lebih 4179 lembaga di seluruh Provinsi Jawa Timur. Dukungan layanan administrasi yang diberikan mulai dari Survey lokasi, pengecekan kesesuaian berkas proposal, persiapan dokumen pencairan yang dari keseluruhan proses ini bisa memakan waktu hingga 10 Bulan. Hal tersebut tentu menjadi beban tersendiri mengingat hibah bukan merupakan tugas, pokok dan fungsi utama Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur tentang tugas, pokok dan fungsi.

Ditambah lagi dengan adanya PP 12 tahun 2019, hibah yang sebelumnya tertuang dalam DPA SKPKD harus melebur menjadi satu dalam DPA SKPD. Hal tersebut tentu sangat berdampak pada kinerja anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat setiap bulannya.

- 5) Meskipun hibah bukan merupakan tugas utama, namun 99% anggaran Biro Kesra adalah anggaran hibah, sehingga diperlukan pembaharuan sistem percepatan khusus dalam proses pencairan bantuan hibah. Dengan adanya Inovasi DESA BASRA (Desk Administrasi Bantuan Hibah Biro Kesra) Anggaran Hibah yang sebelumnya dapat terserap secara keseluruhan pada triwulan ke-IV kini anggaran hibah dapat terserap secara keseluruhan pada triwulan ke- III. Hal tersebut menunjukkan bahwa Inovasi DESA BASRA dapat meningkatkan efektifitas proses dukungan layanan administrasi bantuan hibah hingga 25%. Dari Segi Efisiensi, PAD Jawa Timur juga mengalami penurunan sehingga berdampak pada pengurangan alokasi anggaran operasional hibah pada biro kesra tetapi tidak diiringi dengan pengurangan jumlah penerima hibah. Namun melalui inovasi ini, Biro Kesra tetap dapat memberikan pelayanan maksimal dengan anggaran 20% lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.

b. Weakness – Opportunity

Menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal

- 1) Melalui pertemuan daring dan pertemuan luring dengan protokol kesehatan yang ketat, Biro Kesejahteraan Rakyat berupaya untuk tetap menghasilkan kinerja melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Mitra.
- 2) Fokus untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Mitra selama masa awal pandemi dalam perumusan kebijakan, sebelum adanya arahan Gubernur untuk survei lembaga calon penerima bantuan hibah.

- 3) Memanfaatkan anggaran dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan kinerja.

c. Strength – Threats

Menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal

- 1) Perlu adanya upaya untuk menyusun dokumen perencanaan ditingkat Sekretariat Daerah, dengan memperhatikan tugas dan fungsi keberadaan Sekretariat Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

d. Weakness – Threats

Memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal

- 1) Sebagai unsur fasilitator dan koordinator Biro Kesejahteraan Rakyat menggandeng Perangkat Daerah yang menjadi mitra agar dapat bekerjasama dalam menanggulangi permasalahan. Upaya penyelesaian permasalahan yang kompleks dan lintas sektor menjadi tanggung jawab Biro agar dapat terus eksis dimasa pandemi.
- 2) Adanya tugas tambahan yang besar terkait Peringatan Hari Besar Nasional dan dukungan layanan administrasi bantuan hibah tidak menjadi alasan untuk tidak hadir pada rapat terkait tupoksi. Dengan adanya pemanfaatan IT melalui zoom meeting, Whatsapp group, live Instagram dan live youtube menjadi sarana untuk bisa tetap eksis dan berkinerja dalam perumusan kebijakan.

e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

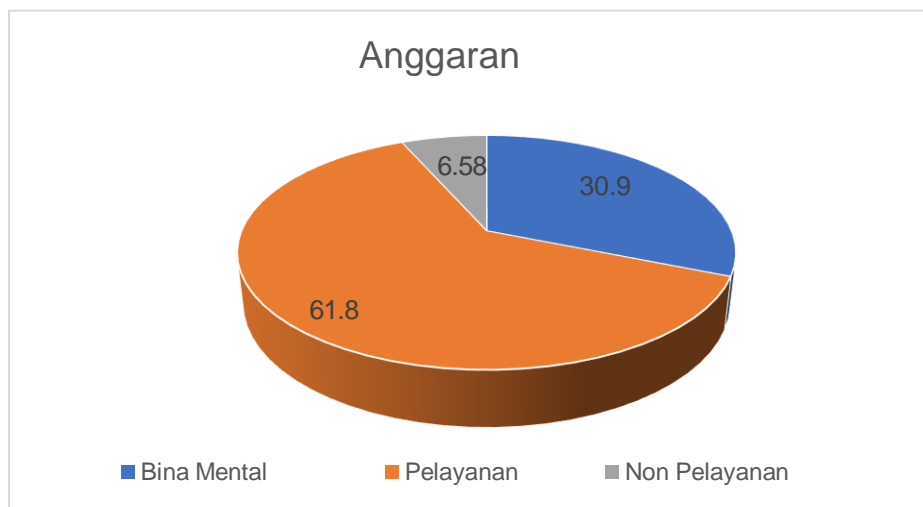
Ada berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung pencapaian kinerja, yaitu kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana serta anggaran di Biro. Terkait sumber daya anggaran. Untuk mengetahui persentase anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada masing-masing sasaran strategis jika dibandingkan dengan

keseluruhan anggaran pada Biro Kesejahteraan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Alokasi per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1.	Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti 	1.096.832.091 .995	97
		<ul style="list-style-type: none"> Nilai Evaluasi Implementasi Sakip 	33.563.608. 271	87

Berdasarkan tabel tersebut, faktor dukungan anggaran pada sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat di Tahun 2023 adalah untuk Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang dalam pelaksanaannya anggaran tersebut melekat pada masing-masing bagian dan jumlahnya sangat bervariasi. Di tahun 2023 sebagian besar terdapat pada kebijakan di bidang Bina Mental Spiritual. Hal tersebut dikarenakan tidak ada Perangkat Daerah lain di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menangani urusan bina mental Spiritual selain Biro Kesejahteraan Rakyat. Pemerintah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat dapat hadir untuk memberikan ketenangan spiritual di masyarakat melalui berbagai kebijakan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan. Di tahun 2023 merupakan fase endemi sehingga anggaran yang sudah dianggarkan menyesuaikan kondisi endemi mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya namun hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat. Faktor dukungan anggaran pada masing-masing sasaran yang diampu oleh setiap bagian dapat digambarkan dari diagram berikut :



Pemanfaatan sumber daya anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi anggaran yang dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			Tar get	Reali sasi	Capai an	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capai an
1.	Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	• Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	88	98,80	112,27	1.096.832.091.995	1.040.326.491.003	94,85
		• Nilai Evaluasi Implementasi Sakip	83	89,13	107,38	33.563.608.271	29.923.783.622	89

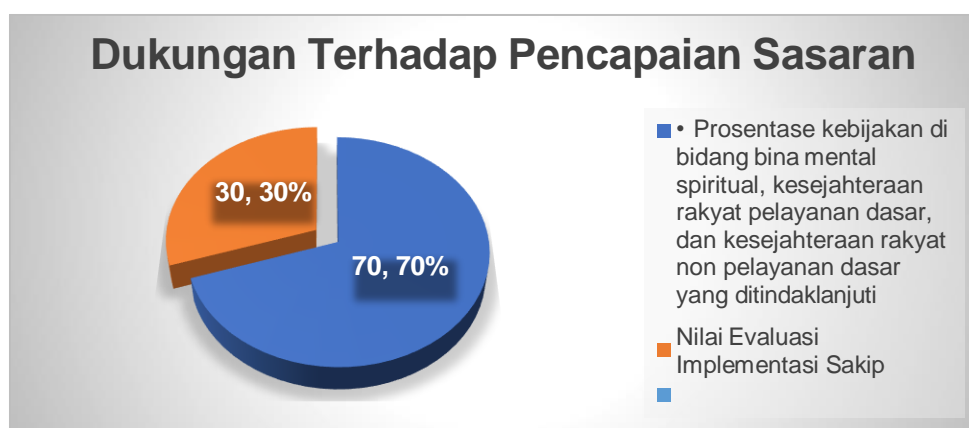
f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat selama tahun 2023 sebagaimana tergambar dalam Tabel III.1 berhasil diraih karena adanya kinerja dari masing-masing bagian untuk menghasilkan rekomendasi dan rumusan kebijakan sebagai hasil dari koordinasi dengan PD mitra yang terkait dengan tupoksi Biro Kesejahteraan Rakyat. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat dapat digambarkan sebagai berikut :

Tujuan Biro : Menumbuhkembangkan keharmonisan sosial melalui fasilitasi kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar		
Indikator sasaran	Capaian	Mendukung Sasaran
<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti 	100 %	70 %
<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Evaluasi Implementasi Sakip 	100 %	30 %
Capaian Sasaran Tahun 2023		100 %

Pencapaian sasaran secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 93,74%

Dari tabel tersebut, dapat digambarkan pada diagram sebagai berikut :



Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa masing-masing bagian berkontribusi pada pencapaian sasaran Biro dengan jumlah yang hampir sama besar. Meskipun terdapat perbedaan capaian pada masing-masing bagian, namun semuanya telah bersinergi dan bekerja sama untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan Rakyat.

Dari berbagai tabel dan analisa yang telah disampaikan mengenai capaian kinerja tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah bisa dipertanggungjawabkan, dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seperti :

- a) Tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Pimpinan seperti dukungan layanan administrasi bantuan hibah dan Peringatan

Hari Besar Nasional belum dapat diakomodir pada Keputusan Gubernur 188/48/KPTS/013/2022;

- b) Belum adanya dokumen perencanaan dilevel Sekretariat Daerah yang menjadi acuan untuk menyusun dokumen perencanaan dilevel Biro, sehingga selaras antara tujuan dan sasarannya dalam rangka mendukung sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur;
- c) Kurangnya koordinasi antar instansi di Kabupaten/Kota, sehingga seringkali berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang kurang maksimal di daerah;
- d) Hasil rapat koordinasi belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara langsung, mengingat ada pembagian kewenangan dan urusan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Namun beberapa kondisi tersebut tidak membuat kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat memburuk, namun sebagai pendorong untuk lebih baik lagi dalam mencapai target kinerja kedepannya. Jika melihat bahwa hampir semua indikator di Biro Kesejahteraan Rakyat mengalami peningkatan dalam perubahan, maka dapat disimpulkan bahwa pandemi tidak menghambat Biro untuk terus berkinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran pada tahun 2023 untuk setiap program telah dilakukan sebaik mungkin oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, dengan penyerapan anggaran 94,68% di tahun 2023. Realisasi anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.563.608.271,00	29.923.783.622,00	89
2	Program Kesejahteraan Rakyat	1.096.832.091.995,00	1.040.326.491.003,00	94,85

	<i>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</i>	1.054.096.757.646,00	1.002.172.108.093,00	95,07
	<i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</i>	5.454.802.190,00	4.561.722.298,00	83,63
	<i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</i>	37.280.532.159,00	33.592.660.612,00	90,11

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Biro Kesejahteraan Rakyat, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP, antara lain :

- a. Menerapkan budaya kerja Gus Kesra untuk menyusun indikator kinerja yang sesuai dan menghitung waktu kerja efektif yang rasional, serta capaian kinerja masing-masing staf;
- b. Bekerja sama dengan perangkat daerah mitra untuk mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan agar bisa menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat integratif;
- c. Pemanfaatan evaluasi kinerja triwulan untuk menghitung capaian kinerja staf menyesuaikan dengan target bulanan dan tahunan;
- d. Pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mensupport kinerja pegawai.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM Aparatur, dan pelaksanaan kebijakan merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dari Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2023 yang telah ditampilkan pada BAB III, maka dapat dilihat capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2023 sudah sesuai target.

B. Saran

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat untuk terus meningkatkan kinerja adalah :

- a. Pengembangan kebijakan nasional terkait kodifikasi dan nomenklatur, menjadi salah satu kesempatan untuk penataan kelembagaan dengan tugas dan fungsi yang lebih jelas, tidak tumpang tindih dengan Perangkat Daerah yang menjadi mitra dan juga bisa mengakomodir semua tugas-tugas yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat;

Penyempurnaan mekanisme dan meningkatkan pelayanan administrasi baik tingkat kualitas maupun kuantitas dengan menyusun Standar Operasional Prosedur yang jelas, sesuai dengan proses bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut perlu dilakukan dengan melihat pada proses bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mengenali posisi Biro dan hubungannya dengan Perangkat Daerah lain, dimana Biro merupakan unsur staf di Sekretariat Daerah yang menunjang kinerja Sekretaris Daerah dan menjadi second opinion Gubernur dan berbeda dengan Dinas yang merupakan front liner unsur Pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak pelaksanaan rumusan kebijakan;

- b. Peningkatan upaya koordinasi dengan berbagai Instansi terkait baik pusat maupun daerah akan dilakukan lebih intensif, agar dapat mengoptimalkan kinerja Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
- c. Sangat diperlukan saran dari stakeholder terkait dalam rangka peningkatan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat;
- d. Mengoptimalkan SDM yang ada melalui pelatihan dan Bimbingan Teknis.

Demikian Laporan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Biro yang akuntabel. Semoga Laporan ini bisa menjadi salah satu upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat kedepannya.